

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Prajitno. (2011). *Hukum Fidusia : Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*. Malang : Banyumedia
- Ariyani (2013). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- D.Y. Witanto.(2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pembudayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar, Achmad. M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. (2016). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- HS.Salim (2016). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta:Sinar Grafika.
- HS,H.Salim (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja,(2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cetakan Ke 6*. Jakarta : Rajawali Pers
- Makarim, Edmon. (2013). *Notaris dan Transaksi Elektronik kajian hukum tentang Cybernotary atau Eletronic Notary*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, peter mahmud. (2014). *Penelitian hukum edisi revisi cetakan Ke-31*. Jakarta:Kencana Pranada Media group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Makarim, Edmon. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notaryatau Electronic Notary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Partodiharjo, Soemarno, (2009). *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi Usman. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Setiawan, I Ketut Oka,(2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H. (2016). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Subekti, (2002), *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sunaryo (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan fidusia*. Sleman : Penerbit Garudhawaca.
- Suryati (2017). *Hukum Perdata*. Yogyakarta : Suluh Media
- Soerjono. Soekanto. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thong Kie, Tan(2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta:Ichthiar Baru Van Hoeve
- Windari, Ratna Artha.(2014).*Hukum Perjanjian*.Yogyakarta : Graha Ilmu.

JURNAL

- Andalan, Affan Muhammad, (2019) *Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial*. Jurist Diction, Vol. 2 No.6 :1939
- Abdur Rachman, (2021) *Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Fidusia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surabaya Vol.9 No.1: 35
- Aulia Delvina, (2019). *Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Volume 5 No. 1, 1306.
- Bayu ardwiansyah, (2017). *Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Lex Privatum Vol.V/No.7 : 85
- Husnul Hudzaifah, (2015). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Lyta Berthalina Sihombing (2020). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. 8 (1):135

Nizar Apriansyah, (2018). *Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Elektronik*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 12. No.3 : 56

Wahyu Agus Winarno, (2011). *Sebuah kajian pada Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE)*. Jurnal Ekonomi Akutansi dan Manajemen, Universitas Jember, Vol.10 No.1 : 40

SKRIPSI/THESIS

Mohammad Afnan Hissan. 2019. *“Tinjauan Yuridis Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia”*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Tutwuri Handayani. (2009) *Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Tesis Universitas Diponegoro : Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Direktorat Jenderal AHU tertanggal 5 Maret 2013, No.AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online System).

INTERNET

Balai Sertifikasi Elektronik. 2020. Jenis Tanda Tangan Elektronik. <https://bsre.bssn.go.id/index.php/2020/06/15/jenis-tanda-tangan-elektronik/>. Diakses tanggal 28 Oktober 2020.

Litigasi. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Fidusia. <https://litigasi.co.id/hukum-bisnis/653/pengertian-dan-prinsip-prinsip-fidusia>. Diakses tanggal 16 Desember 2020.

